

- Sarana dan Prasarana/Penggunaan teknologi Pengolahan belum memadai
- Akses pemasaran dan promosi yang kurang berkembang
- Akses permodalan dengan bunga rendah yang masih lemah
- Pemahaman terhadap pentingnya legalitas HAKI yang masih kurang
- Sumber daya manusia yang masih belum profesional
- Sarana dan Prasarana/ pengguna teknologi belum memadai
- Akses pemasaran dan promosi yang kurang berkembang
- Akses permodalan dengan bunga rendah yang masih lemah
- Pemahaman terhadap pentingnya legalitas produk yang masih kurang sebagai jaminan terhadap konsumen (legalitas yang diwajibkan oleh peraturan, HAKI, Sertifikat Halal, SNI, Ijin BPOM dll)
- Terbatasnya anggaran untuk memenuhi proposal peralatan yang masuk
- Upaya peningkatan kemampuan teknis SDM untuk UPT Batu Mulia
- Belum Mampunya IKM untuk legalisasi produk (utamanya makanan basah)
- Kemampuan SDM dari IKM yang masih kurang sehingga perlu pelatihan teknis
- Kurangnya akses produk IKM untuk di promosikan
- Produk IKM yang belum berdaya saing
- Terbatasnya anggaran untuk memenuhi proposal peralatan yang masuk
- Belum Mampunya IKM untuk legalisasi produk (utamanya makanan basah)
- Kemampuan SDM dari IKM yang masih kurang sehingga perlu pelatihan teknis
- Kurangnya kesempatan event promosi yang bisa diikuti karena terbatasnya anggaran

Solusi :

- Pelatihan manajemen usaha dan teknis industri
- Pemberian fasilitasi dan bantuan sarana dan prasarana bagi HAKI
- Fasilitasi pemberian Batikmark, Fasilitasi pendaftaran Hak Cipta dan Design industry motif pace.
- Fasilitasi promosi melalui pameran dan temu bisnis di berbagai even Regional dan Nasional
- Fasilitasi ke sektor pembiayaan baik dari dinas atau BUMN dan Perbankan

- Pelatihan manajemen usaha dan teknis industri
- Pemberian fasilitasi dan bantuan sarana dan prasarana bagi IKM
- Fasilitasi promosi melalui pameran dan temu bisnis baik local regional maupun nasional
- Fasilitasi ke sektor pembiayaan baik dari dinas atau BUMN dan Perbankan
- Pemberian fasilitasi pendaftaran hak merk, hak cipta dan desain industri
- Pelatihan manajemen usaha dan teknis industri
- Pemberian fasilitasi dan bantuan sarana dan prasarana bagi IKM
- Fasilitasi promosi melalui pameran dan temu bisnis baik lokal regional maupun nasional
- Fasilitasi ke sektor pembiayaan baik dari Dinas atau BUMN dan Perbankan
- Pemberian fasilitasi pendaftaran hak merk dagang, hak cipta dan desain industri dan legalitas yang lain
- Pelatihan manajemen usaha dan teknis industri
- Pemberian fasilitasi dan bantuan sarana dan prasarana bagi IKM
- Fasilitasi promosi melalui pameran dan temu bisnis baik lokal regional maupun nasional
- Pemberian fasilitasi pendaftaran hak merk dagang, hak cipta dan desain industri dan legalitas yang lain
- Pelatihan manajemen usaha dan teknis industri
- Pemberian fasilitasi dan bantuan sarana prasarana bagi IKM
- Fasilitasi promosi melalui pameran dan temu bisnis baik lokal regional maupun nasional

8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Permasalahan :

- Animo masyarakat Pacitan masih memilih daerah tujuan tertentu.
- Jatah penempatan pada Transmigrasi tergantung dari Propinsi, jatah penempatan pada tahun berjalan Kabupaten belum siap dana maupun KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)

Solusi :

- Sosialisasi kepada masyarakat, dari hasil survey lokasi calon transmigrasi.
- Ketersediaan dana untuk Kerja Sama Antar Daerah (KSAD), dan pemberangkatan transmigran.

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan Tahun 2015 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2016-2017 dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Pacitan berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2016 Kabupaten Pacitan sedang menyusun RPJMD periode 2016-2021 yang akan menjadi landasan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah selama lima tahun, dan tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan perencanaan lima tahun tersebut yang merupakan proses berkesinambungan hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 kebijakan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat rukun dan damai dan melanjutkan fokus pembangunan tahun 2015 yang belum tercapai dan diprioritaskan pada layanan meningkatkan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi dan infrastruktur yang mendukung prioritas unggulan daerah juga peningkatan pelayanan pada sektor kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan daerah, kesejahteraan sosial. Sedangkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2017 dan pembangunan bertepatan memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dengan prioritas dan sasaran:

1. Revolusi mental, Pembangunan pendidikan, Pembangunan kesehatan, Perumahan dan Permukiman
2. Kedaulatan Pangan, Energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

3. Pemerataan Antar kelompok Pendapatan, Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pengembangan Konektivitas Nasional.

Adapun isu strategis Jawa Timur tahun 2016 dan tahun 2017 yang merupakan rangkaian pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya adalah:

1. Menuju pertumbuhan yang inklusif

Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2015 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah serta peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

2. Isu strategis yang mengemuka

Adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

3. Disparitas Wilayah

Antara lain dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

4. Infrastruktur

- a. Dibutuhkan penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi darat, laut dan udara dalam konteks integrasi pelayanan antar kota untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa
- b. Dibutuhkan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di Jawa Timur untuk mengundang investasi internasional melalui pelabuhan

- c. Peningkatan harmonisasi kerjasama pemanfaatan barang milik daerah (Provinsi) berupa pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pembangunan pergudangan pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, pembangunan VVIP di terminal Bandara Abdul Saleh serta pengembangan kawasan SURAMADU oleh BPWS dan Pemerintah Daerah
- d. Kebutuhan akan pertambahan panjang Jalan Nasional (Tol dan Non Tol), Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota
- e. Peningkatan percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur terkait percepatan penggantian penggunaan lahan perhutani tuntas 2016
- f. Peningkatan dan pembangunan Jalan Raya Gresik untuk mendukung aksesibilitas kegiatan pelabuhanan Teluk Lamong yang merupakan pengembangan kapasitas dari Pelabuhan Tanjung Perak
- g. Percepatan pembangunan Jalan Tembus Lawang-Batu
- h. Guna mereduksi bencana banjir dan kekeringan masih diperlukan gagasan realistis dan strategis antara lain dengan pengalihan sebagian debit banjir dengan cara sudetan dan pembangunan waduk lapangan dengan lapisan Geomembran
- i. Selain infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman
- j. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan air minum dan persampahan secara regional melalui penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota
- k. Dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, bencana banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahun, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air

5. Pengangguran

Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim.

6. Energi

Ratio ketersediaan listrik Jawa Timur sebesar 70,53 persen. Selebihnya sebesar 29 persen adalah ketersediaan listrik yang sudah dan dalam proses diusahakan sendiri (*captive power*) untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya

hidup, maka kebutuhan energi juga akan meningkat dengan kontribusi pertambangan sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa Timur. Eksploitasi sumber daya mineral tersebut belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tanpa ijin atau belum sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sampai dengan tahun 2012, pertambangan tanpa ijin di Jawa Timur seluas 1.438,08 hektar tersebar di 20 kabupaten, dengan upaya penertiban per tahun berkisar 213,23 hektar.

7. Lingkungan Hidup

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan, hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (*diolah dari berbagai sumber, Tahun 2012*). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestik dan limbah industri. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 - 2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

8. IPM

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada komponen angka harapan hidup, ini masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Dari data BPS dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk yang menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septik tank. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.

9. Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan

2. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam
4. Belum optimalnya peran kelembagaan petani
5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agrobisnis
6. Ketahanan Pangan
 - a. Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi
 - b. Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian

10. Kerjasama Daerah

Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

11. Komunikasi dan Informatika Penanggulangan Bencana

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 -2014 dan Perkiraan Tahun 2016

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dari indikator makro sosial ekonomi. Berbagai indikator makro yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja pembangunan salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan pembangunan Kabupaten Pacitan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari kondisi perekonomian daerah tahun 2012 yang ditunjukkan dari nilai PDRB harga berlaku sebesar Rp.8.477.666 milyar dan pada tahun 2013 sebesar Rp.9.415.665 dan meningkat menjadi Rp.10.498.654 milyar pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp.2.021.006 juta pada tahun 2014. Sedangkan distribusi PDRB per sektor tahun 2012 s/d tahun 2014 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel. T-III.1
Kontribusi PDRB Sektoral

(Rp.000.000)

NO	SEKTOR	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.569.127,10	2.853.202,20	3.205.973,20
2	Pertambangan dan Penggalian	507.739,70	543.347,00	619.435,50
3	Industri Pengolahan	586.807,60	638.930,10	703.833,80
4	Pengadaan Listrik, Gas	2.939,70	2.912,90	3.001,80
5	Pengadaan Air, pengolahan sampah, Limbah	7.731,20	8.766,50	9.586,40
6	Konstruksi	1.250.720,60	1.402.753,40	1.587.605,70
7	PERdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan spd motor	1.350.420,60	1.518.502,60	1.669.333,70
8	Tranportasi & Pergudangan	165.783,20	188.539,60	217.275,00
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	153.751,30	174.723,40	200.978,50
10	Informasi dan komunikasi	471.576,20	521.087,70	563.524,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	151.305,80	178.491,50	202.167,00
12	Real Estate	131.389,30	146.606,70	160.161,30
13	Jasa Perusahaan	22.864,70	25.385,30	27.689,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan social Wajib	415.046,90	433.223,10	446.622,90
15	Jasa Pendidikan	393.427,80	451.339,50	509.039,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73.466,60	83.892,90	95.619,70
17	Jasa Lainnya	223.568,60	243.961,30	276.807,00
	JUMLAH	8.477.666,90	9.415.665,70	10.498.654,30

Sumber Data : Pacitan Dalam Angka 2014

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2014 mencapai angka 5,21%, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 prospek perekonomian dalam kondisi baik meski terjadi pelambatan dan dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Memperhatikan kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan hingga tahun 2014 sebagaimana hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dan potensi perekonomian yang ada di Kabupaten Pacitan serta perkiraan kondisi di tahun 2016, maka kondisi perekonomian di tahun 2017 akan menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, antara lain:

1. Dengan diberlakukannya pasar bebas asean maka kondisi perekonomian kabupaten pacitan akan semakin kompetitif sehingga perlu kita berbenah diri untuk memperkuat sektor perekonomian rakyat sehingga dapat melindungi sektor riil dan produk lokal mampu bersaing dengan produk luar.
2. Kondisi gedung prasarana kesehatan dan peralatan kesehatan serta penunjang medis pelayanan yang masih kurang sebagai penunjang dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan, sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat dimaksimalkan. Selain itu Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih cukup tinggi pada tahun 2015 sebesar 91,19 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKB) sebesar 9.73 per 1000 kelahiran hidup
3. Masih rendahnya capaian APK dan APM Pendidikan Menengah pada tahun 2015 sebesar 71,54% bila dibandingkan dengan APK dan APM Pendidikan Dasar sebesar 103,11% pada tahu yang sama dan masih adanya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi SPM
4. Masih rentannya tingkat ketahanan pangan daerah dan belum optimalnya produksi pangan belum utama daerah
5. Kondisi infrastruktur yang masih belum memadai di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal maupun regional dan nasional

Selain tantangan tersebut, ada beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Pacitan di tahun 2017 antara lain:

1. Trend kondisi perekonomian yang terus membaik dengan berkembangnya sektor unggulan seperti pariwisata, jasa dan pertanian diharapkan akan terus dapat dijaga pada tahun 2016 dan bisa berlanjut sampai tahun 2017, dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari pemerintah pusat terkait dengan harga BBM dan pemerintah dapat menjaga stabilitas moneter
2. Kondisi struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menunjukkan trend yang terus membaik dengan meningkatnya penerimaan pendapatan dan meningkatnya alokasi Belanja Langsung diharapkan akan ikut menopang kondisi perekonomian di tahun 2017
3. Hampir selesainya proyek strategis nasional seperti JLS dan infrastuktur lainnya terutama wilayah kota, yang diharapkan akan memperiancar arus

distribusi barang dan jasa sehingga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pacitan tahun 2017.

Dari sisi perekonomian daerah, pencapaian indikator makro ekonomi Kabupaten Pacitan akan sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan arah dan prioritas pelaksanaan program selama lima tahun mengingat tahun 2017 merupakan pijakan pelaksanaan empat tahun berikutnya. Sedangkan proyeksi beberapa indikator makro ekonomi di tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-III.2
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2017

NO	SEKTOR	Tahun 2015**	Tahun 2016**	Tahun 2017***
1	PDRB ADHK (Milyar)	8.978.606	9.463.451	9.986.780
2	PDRB ADHB (Milyar)	11.657.470	12.464.496	13.317.722
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35	5,4	5,53
4	Laju Inflasi (%)	7,60	7,25	7,03
5	PDRB Perkapita (Ribu)	21.351.230	23.553.045	26.151.005
6	Penduduk Miskin (%)	15,87	15,27	14,8
7	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	64,24	64,88	65,52

**/ Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah), data sangat sementara

Dari data diatas bahwa prospek perekonomian tahun 2017 akan menunjukkan perkembangan yang baik sehingga perlu dukungan stabilitas keamanan dalam pelaksanaan pembangunan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua (2) elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pacitan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan keuangan daerah dan asumsi makro ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2017, serta untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan pendapatan daerah antara lain :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengkajian ulang Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah, dan penyusunan kembali Peraturan Daerah dalam kerangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatkan koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pematapan kelembagaan SKPD penghasil

4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
5. Meningkatkan peran dan fungsi peran SKPD penghasil dan
6. Pengelolaan aset daerah berbasis teknologi informasi

Penerimaan pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik meskipun komponen pendapatan yang terbesar masih diperoleh dari Dana Perimbangan baik DAU, DAK dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sesuai dengan analisis dengan acuan tahun-tahun sebelumnya, dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Pacitan pada tahun 2017. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan perkembangan realisasi pendapatan serta proyeksi pendapatan pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.T-III.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Tahun 2014 s/d 2017

NO	URAIAN	JUMLAH			
		2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	82.668.794	89.469.531	109.873.267	124.903.918
1.1.1	Pajak daerah	17.018.500	18.147.500	22.309.000	26.120.000
1.1.2	Retribusi daerah	13.166.141	12.655.181	20.003.131	22.482.531
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.236.525	2.350.510	3.685.561	2.421.047
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	50.247.627	56.316.333	63.875.574	73.880.339
1.2	Dana Perimbangan	811.839.783	833.044.603	990.070.780	1.164.474.833
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	59.226.899	56.353.300	54.902.454	54.584.621
1.2.2	Dana alokasi umum	700.743.024	714.847.233	807.907.686	795.280.445
1.2.3	Dana alokasi khusus	51.869.860	61.844.070	127.260.640	314.376.295
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	319.196.004	308.652.610	334.212.321	237.373.567
1.3.1	Hibah	0	0	0	
1.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	53.166.048	48.635.187	54.625.114	59.719.985
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	181.430.769	260.017.423	357.764.657	177.653.582
1.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya)	84.599.187	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)		1.213.704.582	1.231.166.745	1.512.333.820	1.526.752.319

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa pendapatan daerah masih menggantungkan pada sumber penerimaan pendapatan yang berasal dari pusat baik Dana Perimbangan, maupun dana tranfer lainnya sedangkan Pendapatan Asli Daerah dalam perkembangannya belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintahan di Kabupaten Pacitan.

Penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2014 telah melebihi proyeksi penerimaan pendapatan RPJMD 2011-2016. Pada sisi Pendapatan Asli Daerah capaian tahun 2014 telah melampaui target RPJMD 2011-2016 yang ditetapkan bahkan melebihi proyeksi pada akhir RPJMD. Disisi penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2014 hal tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berjalan secara optimal.

3.2.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:

a. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Belanja Daerah harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, capaiannya diharapkan dapat meningkatkan indikator sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek

administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Arah kebijakan belanja Kabupaten Pacitan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 di fokuskan pada pembangunan untuk mewujudkan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi, peningkatan infrastruktur pendukung sektor unggulan dan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kebijakan ini dituangkan dalam tema pembangunan tahun 2017 yaitu "Peningkatan Kinerja Dan Akuntabilitas Pembangunan Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pacitan".

Sedangkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2017 adalah :

1. Layanan Pendidikan;
2. Layanan Kesehatan;
3. Percepatan Penanguangan Kemiskinan
4. Ketahanan Pangan Daerah;
5. Peningkatan Daya saing ekonomi;
6. Pembangunan Infrastruktur dasar;
7. Perbaikan Tata kelola pemerintahan;
8. Peningkatan Kehidupan Beragama & Sosial Kemasyarakatan.

Sedangkan perkembangan realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2014 s/d tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.T-III.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2014 s/d 2017

(Rp. 000,00)

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung	867.500.566	935.786.180	1.039.732.629	1.000.404.047
2.1.1	Belanja pegawai	725.550.962	766.003.287	778.350.793	707.994.269
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0
2.1.4	Belanja hibah	26.335.801	24.432.345	9.599.525	9.599.525
2.1.5	Belanja bantuan sosial	8.462.084	5.474.547	6.406.647	6.406.647
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	3.673.273	3.574.422	3.970.493	4.860.253
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	101.578.444	134.384.891	239.475.583	269.613.765
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.900.000	1.911.686	1.929.585	1.929.585
2.2	Belanja Langsung	416.820.198	333.836.826	509.822.256	553.116.566
2.2.1	Belanja pegawai	36.538.711	39.263.298	48.719.175	50.147.862
2.2.2	Belanja barang dan jasa	174.943.303	162.411.609	178.206.710	202.072.334
2.2.3	Belanja modal	205.288.184	132.161.917	282.896.370	300.896.370
TOTAL JUMLAH BELANJA		1.284.320.764	1.269.623.006	1.549.554.886	1.553.520.613

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan Belanja Tidak Langsung paling besar dipengaruhi oleh belanja Gaji Pegawai. Pada tahun 2014 jumlah anggaran belanja Gaji Pegawai mencapai Rp.725.550.962 pada tahun 2015 terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp.766.005.287 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.778.350.793 dan tahun 2017 mengalami penurunan akibat adanya penarikan sebagian kewenangan kepada pusat maupun pemerintah provinsi yaitu sebesar Rp.707.994.269 Sedangkan dari sisi belanja langsung maka terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2014 sebesar Rp.416.820.198 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 di proyeksikan sebesar Rp. 553.116.566.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah akan dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA) dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan rasional serta memperhatikan rambu-rambu yang diamanatkan dalam Permendagri tentang penyusunan APBD dan batas maksimal defisit yang diperkenankan. Pembiayaan tersebut meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA). Penerimaan SILPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan. Penerimaan SILPA tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan dan diprioritaskan. Selain melalui SILPA, kebijakan penerimaan pembiayaan juga ditempuh dengan peningkatan Penerimaan Piutang Daerah.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan Daerah tahun 2014 s/d tahun 2017 Kabupaten Pacitan dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel. T-III.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan Daerah
Tahun 2014 s/d 2017

(Rp. 000,00)

NO	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH			
		2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	71.734.182	41.406.261	40.171.066	29.718.293
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	382.000	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		72.116.182	41.406.261	40.171.066	29.718.293
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	1.500.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.500.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
PEMBIAYAAN NETO		70.616.182	38.456.261	37.221.066	26.768.293

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 diarahkan pada peningkatan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Bank Jatim, Bank Perkreditan Rakyat, PDAM dan Perusahaan Daerah yang besarannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sehubungan dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, maka penyusunan RKPD Tahun 2017 berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan 2005 - 2025 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu :

**“Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang
Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya”**

Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2005 - 2025 dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan pembangunan ini, visi pembangunan Kabupaten Pacitan dijadikan pijakan sekaligus tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan yang mandiri, didalamnya terkandung pengertian maju bahwa daerah memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah. Kemandirian ini tercermin antara lain pada ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, kemampuan aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumberdaya lokal yang semakin kuat, dan pengelolaan potensi sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan (berwawasan lingkungan), sehingga mengurangi ketergantungan sumberdaya dari daerah lain, serta kemampuan membangun jaringan kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.

Kabupaten Pacitan yang berdaya saing bahwa setiap kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat dilakukan secara efisien. Dengan demikian, setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pacitan dapat bersaing, baik pada level lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan

efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi. Sedangkan setiap produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk dari Kabupaten Pacitan bisa bersaing di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Berdaya saing dimaksudkan disegala aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Kabupaten Pacitan yang aman didalamnya terkandung pengertian adil bahwa setiap aktivitas kehidupan masyarakat dan pemerintahan memiliki kedudukan hukum yang sama, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan mendapatkan jaminan keadilan dan rasa aman, baik secara fisik maupun non-fisik. Kedepan Kabupaten Pacitan menjadi daerah yang aman dan nyaman untuk investasi, aktivitas perekonomian, penyelenggaraan pemerintahan dan segenap aktivitas kehidupan bermasyarakat lainnya. Aman juga diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, dan fasilitas publik lainnya.

Kabupaten Pacitan yang sejahtera bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan. Hal ini bermakna, setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Pacitan yang sejahtera secara materiil dan non-materiil. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi masyarakat di wilayah lainnya.

Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus menjunjung nilai-nilai agama dan budaya memiliki arti nilai-nilai agama dan budaya mampu menjiwai aktivitas di segala aspek kehidupan, dalam rangka terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang bercirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, jujur, toleran, bergotong royong, dinamis, dan terbuka terhadap segala perubahan serta bertujuan memperkokoh budaya masyarakat yang tercermin pada peningkatan martabat, kepribadian, dan jati diri masyarakat Kabupaten Pacitan.

Kemudian visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pacitan yang terdiri dari aparatur pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh

masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan. Misi Kabupaten Pacitan 2005 - 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya** dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Pacitan yang berdaya saing, berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata**, dicapai dengan cara meningkatkan produksi pasca panen pada sektor industri pertanian, peningkatan hasil laut dan pengolahannya, serta menumbuhkembangkan pelayanan jasa pariwisata yang kompetitif dengan didukung antara lain oleh peningkatan peran UMKM dan usaha lainnya.
3. **Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil** dicapai dengan cara membangun sarana prasarana daerah yang handal dan terintegrasi sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi, menjamin kelancaran distribusi barang jasa, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
4. **Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya** dicapai dengan cara meningkatkan stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban, konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM, jaminan mengemukakan pendapat, berorganisasi, dan berpolitik serta terjaminnya keleluasan segenap aktivitas kehidupan bermasyarakat yang bertanggungjawab.
5. **Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan** dicapai dengan cara menyelenggarakan pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. **Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government** dicapai dengan cara membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur.

Misi merupakan penjabaran dari visi, pada uraian berikut ini akan disampaikan urutan secara sistematis pencapaian visi melalui misi-misi yang telah disampaikan.

Kabupaten Pacitan yang Mandiri akan terwujud jika masyarakat Kabupaten Pacitan berupaya mengisi kemerdekaan dengan sikap mandiri, berbuat mandiri, dan membangun secara mandiri.

Kabupaten Pacitan yang ber-Day Saing Daerah akan dapat terwujud jika didukung oleh moral dan etika masyarakat serta aparatur daerah yang mulia.

Moral dan etika yang mulia ini akan dapat tercapai jika nilai-nilai agama dan budaya dipahami dan diimplementasikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat pemerintahan. Selain itu, daya saing daerah akan dapat dimiliki oleh Kabupaten Pacitan jika didukung pula oleh pemerintahan yang baik dengan berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*, kualitas sumberdaya manusia yang handal, serta didukung pula oleh infrastruktur daerah yang berkualitas.

Kabupaten Pacitan yang Aman akan terwujud jika unsur-unsur di dalam pencapaian daya saing daerah dapat terpenuhi. Rasa aman ini lebih menitikberatkan pada jaminan bagi kelancaran dan kemudahan terhadap segenap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap masyarakat akan memiliki rasa aman terhadap pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan, sehingga tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan tersebut. Setiap masyarakat akan merasa aman untuk melakukan setiap aktivitas perekonomian, misalnya investor mendapat jaminan kepastian hukum untuk berinvestasi, tenaga kerja mendapatkan perlindungan hukum, pasokan energi dan air bersih yang cukup. Selain itu, masyarakat dijamin untuk bebas mengemukakan aspirasi politik, jaminan untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mengembangkan budaya, beribadah sesuai dengan agamanya, dan jaminan dalam segenap aktivitas kehidupan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pacitan yang sejahtera akan terwujud jika didukung oleh unsur daya saing daerah dan rasa aman untuk beraktivitas di segala aspek kehidupan. Kedua unsur tersebut akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan sehingga masyarakat akan terpenuhi hak-hak dasarnya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Kabupaten Pacitan yang sejahtera juga memberikan garansi bagi kesejahteraan generasi di masa yang akan datang melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Keenam misi diatas dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah dan dilaksanakan melalui program-program pembangunan. Prioritas dirumuskan berdasarkan permasalahan, isu strategis hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2015 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2016 serta tantangan pembangunan merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana format dalam RKP tahun 2017, RPJPD Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi RPJPD 2005 - 2025 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi RPJPD 2005 - 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-IV.1
Hubungan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan

VISI : Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya	1. Terwujudnya karakter masyarakat Pacitan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral yang menjunjung nilai-nilai agama dan budaya yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Pacitan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berkembang dinamis dan berorientasi IPTEK	1. Menurunnya konflik umat beragama 2. Menurunnya angka kriminalitas
		2. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat masyarakat Pacitan, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa	1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Menurunnya jumlah pmks 3. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk 4. Perluasan lapangan kerja 5. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja
		3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya angka melek huruf 2. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya usia harapan hidup 5. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi 6. Menurunnya prevalensi kurang gizi

2.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata	1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain, dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin	1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang terencana dari meningkatnya PDRB per kapita 2. Meningkatnya indeks nilai tukar petani/NTP 3. Menurunnya angka pengangguran serta kemiskinan
		2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, kelautan dan pariwisata yang menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri yang berdaya saing serta meningkatnya peranan sektor jasa.	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 2. Meningkatnya ketersediaan pangan
3.	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil	1. Terwujudnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi, terpenuhinya pasokan energi sesuai dengan kebutuhan dan terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air	1. Meningkatnya status kemandapan jalan
		2. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya	1. Meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan perumahan
		3. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan Terwujudnya ruang wilayah Pacitan sebagai Kabupaten yang mandiri, berdaya saing, aman, sejahtera	1. Berkurangnya ketimpangan antar wilayah
4.	Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya	1. Terwujudnya keamanan daerah yang menjamin martabat kemanusiaan dan keselamatan masyarakat dari gangguan keamanan baik dari luar daerah maupun dalam daerah	1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
		2. Terciptanya supremasi dan penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan dan terciptanya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi
		3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik serta pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan	1. Meningkatnya jumlah organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda dan organisasi masyarakat lainnya

5.	Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan	1. Semakin baiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicenninkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi	1. Menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumberdaya alam 2. Meningkatnya lahan yang ditangani
		2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan daerah	1. Meningkatnya sumberdaya alam hayati termanfaatkan dan diolah untuk industri 2. Meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbarukan
		3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan	1. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup
6.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah	1. Meningkatnya pelayanan publik
		2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri	1. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 2. Menurunnya kerugian negara
		3. Terwujudnya ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif	1. Menurunnya angka kriminalitas
		4. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap sehingga mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah
		5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	1. Meningkatnya peranan swasta dalam pembiayaan pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 atau disebut *nawacita* adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Sembilan Agenda Prioritas tersebut diatas dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan tema pembangunan "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah". Sedangkan tema pembangunan tahun 2017 Provinsi Jawa Timur adalah "Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan memperluas dan mempercepat pembangunan Infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik". Sementara berdasarkan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025, tahun 2017 masuk pembangunan dalam tahapan ke tiga (2016 - 2021) yaitu : "Pemantapan Kemandirian Masyarakat".

Dengan mengacu agenda pembangunan nasional dan indikasi tema pembangunan Jawa Timur serta berpedoman pada pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025, maka tema pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2017 adalah "Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Pembangunan Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Pacitan".

Berdasarkan tema RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 maka ditetapkan prioritas pembangunannya meliputi :

1. Layanan pendidikan
2. Layanan kesehatan
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan
4. Ketahanan pangan daerah
5. Peningkatan daya saing ekonomi
6. Pembangunan infrastruktur dasar

7. Perbaikan tata kelola pemerintahan
8. Peningkatan kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan

Isu Strategis maupun permasalahan yang dihadapi di tahun rencana berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, antara lain :

Meningkatkan kinerja layanan publik dasar untuk kesejahteraan masyarakat: melalui pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan kinerja perekonomian: melalui pengembangan pariwisata, UMKM, industri kecil menengah, dan pertanian didukung infrastruktur dasar yang memadai

Mewujudkan suasana yang kondusif dan harmonis: melalui peningkatan kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan

Sedangkan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Pacitan pada Tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik dasar terutama layanan pendidikan, kesehatan & administrasi
2. Meningkatnya percepatan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu
3. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian di daerah
4. Meningkatnya UMKM dan industri kecil menengah untuk mendukung pengembangan pariwisata
5. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah
6. Meningkatnya infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, irigasi dan air bersih
7. Menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai

Delapan prioritas pembangunan pada tahun 2017 tersebut kemudian dijabarkan dalam program pembangunan daerah, sebagaimana berikut :

Tabel.T-IV.2
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2017	PRIORITAS RKPD 2017
1	Program pendidikan anak usia dini	LAYANAN PENDIDIKAN
	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	
	Program pendidikan menengah	
	Program pendidikan non formal	
	Program pendidikan luar biasa	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program manajemen pelayanan pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2017	PRIORITAS RKPD 2017
2	Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pencegahan dan Penangguangan Penyakit Menular Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program pengembangan lingkungan sehat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program lingkungan sehat perumahan	LAYANAN KESEHATAN
3	Program Pemberdayaan Faldr Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program peningkatan kesempatan kerja Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4	Peningkatan ketahanan pangan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	KETAHANAN PANGAN DAERAH
5	Program perencanaan pembangunan ekonomi Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program pengembangan kemitraan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI

NO	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2017	PRIORITAS RKPD 2017
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rchabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasiitas LLAJ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program pembinaan daa pengembangan bidang ketenagalistrikan Program pengembangan penimahan Program pemberdayaan komunitas perumahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (PTH) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perencanaan tata ruang	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
7	Program pengembangan nilai budaya Program pengelolaan kekayaan budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Nara Pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program penccegahan diri dan penanggulangan kurban bencana alam Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program peningkatan kebcrdayaan masyarakat perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
8	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Penjinaan dan Pengembangan Aparatur Program Penetapan dan Pengendalian SPM Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program penataan administrasi kependudukan Program Penguatan Kelembagaan Penganisutamaan Gender dan Anak Program keluarga berencana Program pelayanan kontrasepsi Program kelitbangan Program perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Adaptin indikator dan target masing-masing prioritas program pembangunan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.T-IV.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD	
			INDIKATOR	TARGET		
1	LAYAKAN PENDIDIKAN	Program Pendidikan anak usia dini	APK PAUD	75,81	Dinas Pendidikan	
		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni (APM):		Dinas Pendidikan	
			SD/MI	99,03		
			SMP/MTs	85,14		
			Angka kelulusan (%):			
			SD/MI	100		
			SMP/MTs	100		
			Angka Partisipasi Kasar (APK):			
			SD/MI/Paket A	103,12		
			SMP/MTs/Paket B	98,62		
			Angka rata-rata lama sekolah	7,27		
			Program pendidikan non formal	Angka Melek Himif (AHM) pada usia 15 s/d 59 th	92,83	Dinas Pendidikan
			Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi minimal SI		Dinas Pendidikan
				SD/MI	87,78	
				SMP/MTs	95,51	
			Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase komite sekolah yang dibina	40	Dinas Pendidikan
		Program peningkatan peranserta kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	156	Dinas Budparpora	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase atlet berprestasi	36	Dinas Budparpora	
2	LAYANAN KESEHATAN	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan gedung puskesmas/pustu dalam kondisi baik	37,18	Dinkes	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah Sakit paru-paru/rumah sakit mata	Sarana dan prasaran rumah sakit yang representatif:		RSUD	
			Persentase ruang rawat inap rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik	69,57		
			Persentase kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (kondisi baik);	85,97		
			Persentase jumlah ambulance/mobil jenazah yang berfungsi dengan baik	77,78		
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	95	Dinkes
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kunjungan puskesmas /visit rate	85,75	Dinkes

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	10,44	RSUD
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun	44,42	RSUD
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sarana Kesehatan Berstandar	0	Dinkes
		Program peningkatan mutu Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40	RSUD
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	73,11	Dinkes
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif berstrata Purnama Mandiri	8,77	Dinkes
		Program lingkungan sehat perumahan	Persentase pengangkutan sampah	90,35	Dinas CKTRK
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular (Diare, DBD, Tb Paru dan pneumonia balita)	100	Dinkes
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan balita gizi buruk	100	Dinkes
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan di sarana kesehatan	98,7	Dinkes
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pelayanan anak balita paripurna	86,6	Dinkes
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	55,11	Dinkes
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja	35	Badan KBPP
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase sekolah dan pondok pesantren yang telah membentuk PIK-R	5	Badan KBPP
		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB mandiri	73,9	Badan KBPP
		Program Pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU	Cakupan kelompok BKB Holistik Integratif ber KB	24,9	Badan KBPP
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan jumlah kader dalam kelompok Tribina	41,09	Badan KBPP
		Program Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan UMKM yang mendapat bantuan modal	143	Dinas Koperindag
		Program pemberdayaan komunitas perumahan	Percepatan peningkatan permukiman dan perumahan layak huni		Dinas CKTRK
			- Persentase permukiman layak huni	99,943	
			- Rumah layak huni	92,21	
		Program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM/LPMD)	6,06	Bapemas & Pendes
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase pertumbuhan lembaga ekonomi pedesaan	2,17	Bapemas & Pendes

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	26,99	Bapemas & Pemdes
		Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	9,98	Badan KBPP
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	2,68	Badan KBPP
		Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Persentase angkatan kerja perempuan	79,2	Badan KBPP
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru	3,07	Dinas Koperindag
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN	60	Dinas Sosnakertrans
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	75	Dinas Sosnakertrans
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha	60	Dinas Sosnakertrans
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan	78,3	Dinas Sosnakertrans
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	60	Dinas Sosnakertrans
		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar	80	Dinas Sosnakertrans
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyaldt Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina	80	Dinas Sosnakertrans
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan	65	Dinas Sosnakertrans
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak	Persentase advokasi dan fasilitasi PUG dan anak	36,96	Badan KBPP
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dar. anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	100	
		Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	87,07	Bapemas & Pemdes
4	KETAHANAN PANGAN DAERAH	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Indeks Pertanaman Padi (IP)	1,75	Distanak
			Cakupan kelembagaan petani (poktan) yang terfasilitasi	24,33	Distanak
			Persentase peningkatan kelas kelompok tani	2,62	Distanak
			Cakupan kelompok tani yang dilatih teknologi perkebunan	0	Dinas Hutbun

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	10.891,42	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya (kolam, keramba, - minapadi, tambak) (ton)	801.448	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Optimalisasi pengelolaan produksi Perikanan	Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	1.398,28	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Peningkatan peternak yang mendapat fasilitasi	1,26	Distanak
		Program Peningkatan Kapasitas Pelaku usaha Perkebunan	Persentase pelaku usaha perkebun yang mendapat pembinaan	0	Dinas Hutbum
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	Cakupan masyarakat perikanan yang mandiri (orang)	4.514	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase status kesehatan ternak	87,5	Distanak
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi daging (kg)	3.247.446	Distanak
			Produksi telur (kg)	498.000	
			Produksi Susu (lt)	21.600	
			Populasi ternak potong besar (ekor)	85.399	
			Populasi ternak potong kecil (ekor)	171.213	
			Populasi unggas (ekor)	1.111.778	
		Program peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan beras di kabupaten (ton)	116.117	Kantor Ketapang
			Tertanganinya daerah rawan pangan	58,14	Kantor Ketapang
			Pangan yang aman	89	Kantor Ketapang
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi hasil perkebunan (ton/Ha)	37.482	Dinas Hutbum
			Produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/h)	54,57	Distanak
			Produktifitas tanaman pangan per ha padi dan palawija (kw/h)	90,61	Distanak
			Produksi tanaman pangan padi dan palawija (ton)	885.114	Distanak
			Produksi hortikultura (ton)	65.836	Distanak
5	PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi (trilyun)	0,693	BPMPP
			Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	26,84	
		Program Peningkatan, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100	BPMPP

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Lama proses izin usaha Penanaman Modal (hari)	6	
			Jumlah Perda dan Perbup dan kebijakan lain yang mendukung iklim investasi	4	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya	100	Dinas Koperindag
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	Persentase rata-rata pasar daerah dalam kondisi baik	80,25	DPPKA
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Omset perputaran komoditas unggulan	711 M	Dinas Koperindag
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	12,5	Dinas Koperindag
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	87,47	Dinas Koperindag
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang dibina	3,47	Dinas Koperindag
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil menengah dan kerajinan	11 347	Dinas Koperindag
		Program Sentra Sentra Industri Potensial	Persentase pertumbuhan industri	3,9	Dinas Koperindag
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Pacitan	25	Dinas Budparpora
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase museum Geosite yang dikembangkan	42	Dinas Budparpora
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Pacitan yang difasilitasi	69	Dinas Budparpora
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	33	Dinas Budparpora
6	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun		Dinas Bina Marga dan Pengairan
			Jalan	39,8	
			Jembatan	42,8	
		Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		Dinas Bina Marga dan Pengairan
			Jalan	56,15	
			Jembatan	92,81	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		Dinas Bina Marga dan Pengairan
			Alat berat	68,57	
			Alat laboratorium	93,55	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik		Dinas Bina Marga dan Pengairan
			Jalan	24,75	
			Jembatan	50,1	

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Peningkatan pembangunan jalan lingkungan	55,38	Dinas CKTRK
		Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	33,94	Dinas Hubkominfo
		Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	31,71	Dinas Hubkominfo
		Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji)	39,44	Dinas Hubkominfo
		Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	36,77	Dinas Hubkominfo
		Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas	64,64	Dinas Hubkominfo
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih /air minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih perkotaan	69	Dinas CKTRK
			Persentase rumah tangga pengguna air bersih perdesaan	37,92	
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik	80,34	Dinas CKTRK
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luas sawah beririgasi dalam kondisi baik	44,30	Dinas Bina Marga dan Pengairan
			Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	39,30	
			Luas sawah baru beririgasi	0	
		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah embung dalam kondisi baik	11	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Program perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan	4	Dinas CKTRK
		Program pemanfaatan ruang	Jumlah bangunan ber IMB per total bangunan	71,72	Dinas CKTRK
		Program pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	30	Dinas CKTRK
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya pengelolaan taman kota dan penerangan jalan umum	10,83	Dinas CKTRK
			Jumlah penataan kawasan wisata dan penanda kawasan	7	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengolahan sampah akhir	27	Kantor Lingkungan Hidup
			Penghargaan Kebersihan Nasional	ada	Kantor Lingkungan Hidup
			Penumbuhan bank sampah	13	Kantor Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Taman Kehati	0	Kantor Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Persentase taman kota yang tertata	36,9	Dinas CKTRK
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan kualitas lingkungan	156	Kantor Lingkungan Hidup
			Dokumen Lingkungan	1,304	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pemantauan kualitas lingkungan untuk industri hasil tembakau	2	Kantor Lingkungan Hidup
			Indeks Tutupan Hutan (ITH)	72,27	
7	FENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Program Peningkatan Kerukman Umat Beragama	Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan	0	SETDA
		Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase petugas LINMAS terlatih	27	SATPOL PP
		Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase jumlah pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERKADA	90	SATPOL PP
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam (kali)	2	SATPOL PP
		Program pengembangan nilai budaya	Persentase seniman/ budayawan yang di bina	85	Dinas Budparpora
8	PERBAIKAN TATA KELOLA PEMRRINTAIAN	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Penerbitan :		Dispendukcapil
			1. KTP	91,38	
			2. Kartu Keluarga	95,7	
			3. Akta Kelahiran	81,43	
			4. Akta Kematian	54,69	
		Program pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informatika	Persentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	0	Dinas Hubkominfo
		Program penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase SKPD yang menerapkan SOP	100	Sekretariat Daerah
		Program fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika	Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi	25	Sekretariat Daerah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	Semua SKPD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja sesuai standart daerah	100	Semua SKPD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	Semua SKPD
		Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan sumber daya aparatur sesuai ketentuan jabatan	10,29	BKD dan Kantor Diklat
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi jam kerja sesuai ketentuan	8,79	BKD

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	33,68	BKD
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah dokmnen data/informasi/statistik daerah yang dihasilkan	3	Balitbangtik
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip in aktif yang dikelola	4 320 Box	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarpras Kearsipan	Jumlah arsip stasis yang dipelihara	97 Box	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku	65,89	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	59.040	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
		Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa	Jumlah informasi publik yang terpublikasi	210	Dinas Hubkominfo
			Jumlah Kelompok Infonnasi Masyarakat	12	Dinas Hubkominfo
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan desa dan kelurahan tangguh bencana	2,5	BPBD
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota	100	Dinas CKTRK
		Program pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH bidang pemerintahan umum	Ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	< 90 hari	Sekretariat Daerah
			Persentase regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa	10,33	
		Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH / Wakil KDH	Keterpaduan program pemerintah	140 kali	Sekretariat Daerah
		Program penataan daerah otonomi	Persentase tertib administrasi kewilayahan	16,67	Sekretariat Daerah
		Program peningkatan kerjasama daerah	Cakupan perjatjian kerjasama yang ditangani	40	Sekretariat Daerah
		Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi pembangunan	Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui ULF	40	Sekretariat Daerah
		Program koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bidang administrasi perekonomian	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang diterbitkan	18,92	Sekretariat Daerah
		Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang administrasi sumber daya alam	Persentase kebijakan bidang sumber daya alam yang diterbitkan	14,29	Sekretariat Daerah
		Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan	14,29	Sekretariat Daerah
		Program penataan peraturan perundang-undangan	Pen entase produk hukum daerah yang ditetapkan	45,57	Sekretariat Daerah
		Program peningkatan Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Persentase kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi	100	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase raperda yang ditetapkan bersama (Perda)	58,62	Set. DPRD

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD	100	Bappeda
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	35,56	Bappeda
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang perekonomian yang dihasilkan	38,98	Bappeda
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCI)	Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan	26,67	Bappeda
		Program Perencanaan wilayah dan SDA	Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	50,7	Bappeda
		Program Kelitbangan / Inovasi Daerah	Persentase kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Yang Dimanfaatkan	95	Balitbangtik
		Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini audit BPK terhadap Laporan keuangan daerah	WTP	DPPKA
			Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	DPPKA
			Cakupan pendapatan daerah	1,3	DPPKA
		Program peningkatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase pengadaan tanah untuk sarana kesehatan	4,17	Semua SKPD
			Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	32,46	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai evaluasi SAKIP SKPD	CC	Semua SKPD
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan :		Inspektorat
			Persentase Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT	100	
			Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	90,16	
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pemeriksa pengawasan yg mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan	42,5	Inspektorat
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun	87,5	Inspektorat
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Inspektorat
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa dengan administrasi baik	78,91	Bapemas & Pemdes

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas. Untuk mengetahui rencana program, kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif dan lokasi yang tercermin pada masing-masing SKPD serta keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menurut bidang urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 maka dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. T-V.1
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
0	NON URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									72.844.764.599,00	72.844.764.599,00	
0.00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		01. Meningkatkan tata keioia pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima		Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100			49.098.661.099,00	49.098.661.099,00	Semua SKPD	
0.00 01.19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran						Operasional pengelolaan administrasi perkantoran yang baik	100%	45.314.264.398,00	45.314.264.398,00		
0.00 01.20	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian						Tertaksananya pengelolaan adminstrasi kepegawaian	100%	247.750.000,00	247.750.000,00		
0.00 01.23	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT						Belanja harang, jasa kantor, pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas serta belanja modal bagi UPT Kecamatan	12 UPT	234.646.701,00	234.646.701,00		
0.00 01.24	Pelayanan Administrasi Kepegawaian						Honor Panitia Jabatan Fungsional	100%	100.000.000,00	100.000.000,00		
0.00 01.25	Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah						Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	100%	350.000.000,00	350.000.000,00		
0.00 01.26	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran						Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran	12 bulan	1.071.000.000,00	1.071.000.000,00		
0.00 01.27	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi pemberdayaan Masyarakat Desa						meningkatnya keberdayaan masyarakat	100%	356.200.000,00	356.200.000,00		
0.00 01.28	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	356.200.000,00	356.200.000,00		

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00 01.29	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban						Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban	100%	356.200.000,00	356.200.000,00	
0.00 01.30	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial						Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	100%	356.200.000,00	356.200.000,00	
0.00 01.31	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan						Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan	100%	356.200.000,00	356.200.000,00	
0.00 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		01. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima		Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100			20.937.940.000,00	20.937.940.000,00	Semua SKPD
0.00 02.03	Pembangunan gedung kantor						Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Yang Memadai	100%	8.170.000.000,00	8.170.000.000,00	
0.00 02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional						Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	100%	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	
0.00 02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas						Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	100%	251.400.000,00	251.400.000,00	
0.00 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Pengadaan perlengkapan gedung kantor : Jumlah kursi rapat Jumlah rak arsip tisi Jumlah Pengadaan laptop Jumlah Pengadaan Printer Jumlah pengadaan LCD Jumlah Pengadaan AC	100%	1.045.500.000,00	1.045.500.000,00	
0.00 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	1.343.000.000,00	1.343.000.000,00	
0.00 02.10	Pengadaan mebeleur						Terlaksananya Pengadaan Mebeler Kantor	100%	570.850.000,00	570.850.000,00	
0.00 02.14	Pengamanan Aset Daerah						Terpeliharanya gedung-gedung kantor/ aset daerah	100%	400.000.000,00	400.000.000,00	
0.00 02.30	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah pembangunan pagar, garasi dan paving gedung Dinkes (UPT GFK)	100%	665.690.000,00	665.690.000,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00 02.32	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100%	465.000.000,00	465.000.000,00	
0.00 02.39	Pemeliharaan mesin , jaringan dan Pengembangan PABX						Sarana telekomunikasi antar SDPK terpelihara	100%	45.000.000,00	45.000.000,00	
0.00 02.48	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor						Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	
0.00 02.50	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor						Terlaksananya Rehab Kantor	100%	660.000.000,00	660.000.000,00	
0.00 02.53	Pembangunan Sarana Gedung Kantor						Terlaksananya Pembangunan Sarana Gedung Kantor	100%	1.615.000.000,00	1.615.000.000,00	
0.00 02.67	pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan Peningkatan Kapasitas Personil persandian						Terjaganya keamanan kirim dan terima berita rahasia	100%	56.500.000,00	56.500.000,00	
0.00 02.72	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Pajak Rokok)						Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	
0.00 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		01. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima		Tingkat disiplin aparatur	100			1.133.711.000,00	1.133.711.000,00	Semua SKPD
0.00 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal						Jumlah peserta Diklat Sar Linmas bagi PNS/CFNS	100%	290.000.000,00	290.000.000,00	
0.00 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan						Jumlah PNS yang Mengikuti Bintek	100%	133.711.000,00	133.711.000,00	
0.00 05.12	Jambore dan Hari Jadi Satpol PP						Jumlah peserta JAMBORE dan HUT SATPOL PP	100%	160.000.000,00	160.000.000,00	
0.00 05.32	Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP						Jumlah peserta kesamaptaan/Binjas dan BINTEK ; SAR Linmas, penyelidikan dan penyidikan, intelegensi.	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
0.00 05.61	Pendampingan ISO						Terlaksananya pendampingan ISO	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	
0.00 05.62	Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan						Jumlah SDM SKPD yang mengikuti bimbingan	100%	220.000.000,00	220.000.000,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00 05 79	Peningkatan Kelembagaan PPNS						Terbentuknya Sekretariat dan operasional PPNS	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
0.00 05.80	Fasilitasi upacara 17an dan Upacara Hari Besar Nasional						Terlaksananya Upacara 17an dan Upacara Hari Besar Nasional	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
0.00 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		02. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Hasil nilai Evaluasi SAKIP SKPD	> B			1.674.452.500,00	1.674.452.500,00	Semua SKPD
0.00 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	100%	75.000.000,00	75.000.000,00	
0.00 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran						Penyusunan dokumen Laporan Keuangan tahunan dan tahunan dok CALK dll	3 Dok	15.000.000,00	15.000.000,00	
0.00 06.05	Monitoring, Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri						Penyusunan dokumen Lakip, Renja SKPD SPM, Renstra LPPD dan EKPD dan data lainnya	100%	160.000.000,00	160.000.000,00	
0.00 06.07	Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Barang Daerah						Tersedianya dokumen RKA DPA Induk dan Pembahan, laporan keuangan yang akuntabel serta terwujudnya (7 dokumen), terwujudnya dokumen renja SKPD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah SKPD (2 dokumen)	100%	125.000.000,00	125.000.000,00	
0.00 06.09	Penyusunan Dokumen SAKIP						Dokumen sakiP Pemkab dan Setda Kab. Pacitan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	
0.00 06.10	Monitoring, Penilaian t AKIP dan penilaian Mandiri						Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, Profil SKPD dan IKM	4 dokumen	153.490.000,00	153.490.000,00	
0.00 06.11	Administrasi pelaporan						Terperuhnya Administrasi Pelaporan	100%	72.000.000,00	72.000.000,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00 06.14	Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri						Tertaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP	100%	498.962.500,00	493.962.500,00	
0.00 06.15	Pembahasan perda tentang jasa Pariwisata						Tertaksananya pembahasan perda tentang jasa Pariwisata	100%	275.000.000,00	275.000.000,00	
0.00 06.16	Penguatan Reformasi Birokrasi						Monev Pelaksanaan RB	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								363.832.575.626,00	363.832.575.626,00	
1.01	PENDIDIKAN								30.404.857.623,00	30.404.867.623,00	
1.01 75	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. Layanan Pendidikan	02. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolan keuangan daerah		APK PAUD (%)	80,22			2.514.100.000,00	2.514.100.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 15.01	Pembangunan gedung sekolah						Tertaksananya Pembangunan Gedung PAUD Terpadu	9 paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.01 15.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir						Tertaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.01 15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa						Tertaksananya Pengadaan APE Baik Dalam Atau Luar	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01 15.19	Pengadaan mebelur sekolah						Tertaksananya pengadaan mebelur sekolah	100%	87.500.000,00	87.500.000,00	
1.01 15.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah						Tertaksananya Rehab Ruang Kelas	3 paket	225.000.000,00	225.000.000,00	
1.01 15.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary						Tertaksananya Rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi	100%	120.000.000,00	120.000.000,00	
1.01 15.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik						Tertaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	100%	120.000.000,00	120.000.000,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01 15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini						Tertaksananya Kegiatan Penunjang Kualitas Paud di Kabupaten Pacitan	100%	255.000.000,00	255.000.000,00	
1.01 15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini						Tertaksananya Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Paud (KB/SPS/TPA Dan TK)	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.01 15.69	Pembangunan talud dan pagar sekolah						Tertaksananya Pembiangan Pagar Dan Talud	100%	195.000.000,00	195.000.000,00	
1.01 15.78	Akreditasi PAUD						Tertaksananya akreditasi PAUD	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.01 15.79	Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD						Tertaksananya bantuan operasional penyelenggaraan PAUD	100%	111.600.000,00	111.600.000,00	
1.01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Layanan Pendidikan	02. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Angka partisipasi murni (APM) (%) - SD/MI - SMP/MTs Angka kelulusan (%) - SD/MI - SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B Angka rata-rata lama sekolah (%)	(99,06), (85,18) (100) (100) (103,14) (98,74) (7,31)			23.500.767.623,00	23.500.767.623,00	Dinas Pendidikan
1.01 16.03	Penambahan ruang kelas sekolah						Teraksananya Pembiangan Ruang Kelas Sekolah	2 paket	700.000.000,00	700.000.000,00	
1.01 16.04	Penambahan ruang guru sekolah						Tertaksananya Pembangunan Ruang Guru	100%	240.000.000,00	240.000.000,00	
1.01 16.05	Pembangunan Laboratorium, ruang praktek sekolah dan ruang penunjang lainnya						Teraksananya pembangunan laboratorium, ruang praktek sekolah dan ruang penunjang lainnya	100%	420.000.000,00	420.000.000,00	
1.01 16.06	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi						Tertaksananya Kompetensi Siswa Berprestasi SO, SMP	1 paket	850.000.000,00	850.000.000,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01 16.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir						Terlaksananya Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	3 paket	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01 16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah						Tertaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	2 paket	580.000.000,00	580.000.000,00	
1.01 16.15	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Dan SMP						Terlaksananya OOSN Dan FLS2N SD Seleksi Kab.4 Cabang Dan Terkirimnya Ke Prop/Nas	1 paket	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.01 16.17	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar						Terlaksananya Sosialisasi Dan Penilaian Akreditasi SD, SMP Di Kabupaten Pacitan	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01 16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa						Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	2 paket	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01 16.19	Pengadaan meubelur sekolah						Terlaksananya Pengadaan Meubelair	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01 16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah						Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.01 16.32	Pembangunan ruang ibadah						Terlaksananya pembangunan mang ibadah	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.01 16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah						Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah	100%	696.797.623,00	696.797.623,00	
1.01 16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary						Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary	6 paket	500.000.000,00	500.000.000,00	
1.01 16.57	Penyediaan prasarana pendidikan dasar (DAK)						Terlaksananya Pengadaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	100%	13.848.970.000,00	13.848.970.000,00	
1.01 16.59	Pelatihan Penyusunan kurikulum						Terlaksananya Sosialisasi Kurikulum 2013	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01 16.63	Penunjang Operasional BOS						Terlaksananya Pembinaan Sekolah Penerima Bos	1 paket	300.000.000,00	300.000.000,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01 16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa						Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa SD Dan SMP	1 paket	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.01 16.79	Olympiade MIPA SD/SMP						Terlaksananya MIPA Jalur A Dan MIPA Jalur C Tingkat Kab, Propinsi Dan Nasional	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01 16.85	Pembinaan Gugus Sekolah Dasar						Terlaksananya Fembinaan Manajemen Gugus Di SD Gugus	1 paket	40.000.000,00	40.000.000,00	
1.01 16.91	Pembangunan Pagar Talud SD/ SMP						Terlaksananya Pembangunan Pagar Dan Talud	38 paket	2.710.000.000,00	2.710.000.000,00	
1.01 16.92	Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah						Terlaksananya Proses Try Out Ujian Nasional SD Dan SMP Serta Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional	1 paket	550.000.000,00	550.000.000,00	
1.01 16.93	Fasilitasi Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah						Terlaksananya Pembinaan UKS SD Dan SMP Dalam Rangka Lomba UKS Tingkat Propinsi Dan Kabupaten	1 paket	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.01 16.99	Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP						Terlaksananya Penerimaan PPDB SO, SMP Dan Monitoringnya	1 paket	40.000.000,00	40.000.000,00	
1.01 18	Program Pendidikan Non- Formal	1. Layanan Pendidikan	02. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Angka Melek Huruf (AHM) pada usia 15 s/d 59 th (%)	93,33			655.000.000,00	655.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan						Terlaksananya Pembinaan Kepada Lembaga Kursus	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.01 18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup						Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01 18.15	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)						Terlaksananya Pengiriman Dan Pameran Hasil ProdUKSi Penyelenggara Program Keaksaraan Ke Tingkat Propinsi	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan.	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01 18.16	Penyelenggaraan Peserta Hari Anak Nasional (HAN) .						Terselenggarakannya Han Di Kabupaten Dan Propinsi	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.01 18.21	Pendamping penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C						Tertaksananya Admistrasi Dan Monitoring Penyelenggaraan Ujian Nasional Kejar Paket A, B Can C	100%	80.000.000,00	80.000.000,00	
1.01 18.25	Penyelenggaraan kejar paket A, B, dan C						Tertaksananya Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C	100%	110.000.000,00	110.000.000,00	
1.01 18.27	Jambore PTK PNF						Pemilihan Dan Pengihman PTK PNF Berprestasi Ke Tingkat Propinsi	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.01 18.28	Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan PNF						Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Non Formal	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01 18.32	Pendidikan kewirausahaan masyarakat						Tertaksananya Pelatihan Kewirausahaan Sagi Masyarakat	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01 18.35	Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Rumah Piniar Mini (RPM)						Teriaksananya Pengembangan Sentra Rumah Pintar	100%	60.000.000,00	60.000.000,00	
1.01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Layanan Pendidikan	02. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Prosentase guru yang berkualifikasi minimal S1 (%) - SD/MM - SMP/MTs	(88), (95,75)			1.655.000.000,00	1.665.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik						Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik	100%	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.01 20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi						Tertaksananya Pelatihan Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Profesional	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01 20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Musyawah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP)						Meningkatnya Pengetahuan Dan Wawasan Peserta Bintek KKG/MGMP	100%	210.000.000,00	210.000.000,00	
1.01 20.12	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan						Tertaksananya Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01 20.13	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional						Tertaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	
1.01 20.20	Seleksi Calon Kepala Sekolah						Tertaksanakannya Seleksi Kepala Sekolah Di Jenjang SD, SMP, SMA Dan SMK	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	
1.01 20.22	Penguatan Kepengawasan Sekolah						Tertaksananya Pengawasan Yang Baik Ke Sekolah	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01 20.25	Olimpiade sains guru						Tertaksananya Seleksi Olimpiade Sains Nasional Guru Di Kabupaten Pacitan Dan Pengiriman Kontingen Ke Propinsi Jawa Timur	100%	75.000.000,00	75.000.000,00	
1.01 20.29	Pengembangan SIM-Pendidik dan Tenaga Kependidikan						Tertaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengembangan SIM Pendidik Dan Teknologi Pendidikan	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.01 20.38	Penilaian Kinerja Guru						Tertaksananya Penilaian Kinerja Guru Di Kabupaten Pacitan	100%	75.000.000,00	75.000.000,00	
1.01 20.39	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan TIK						Tertaksanakannya Workshop Metode Pembelajaran Menggunakan TIK	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01 20.41	Workshop Publikasi Ilmiah						Tertaksananya Workshop Publikasi Ilmiah Bagi Guru SD,SMP,SMA Dan SMK	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01 20.43	Seleksi Guru Berprestasi						Tertaksananya Seleksi Guru Berprestasi	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Layanan Pendidikan	02. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Persentase komite sekolah yang dibina (%)	45			2.070.000.000,00	2.070.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan						Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan	100%	70.000.000,00	70.000.000,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01 22.06	Pembinaan Komite Sekolah						Terlaksananya workshop untuk peningkatan kapasitas komite sekolah	100%	75.000.000,00	75.000.000,00	
1.01 22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan	100%	275.000.000,00	275.000.000,00	
1.01 22.10	Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan						Terlaksananya Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.01 22.11	Penyusunan Lakip dan Profil Pendidikan						Tersusunnya dokumen Profil Pendidikan Dan Lakip	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01 22.13	Penyelenggaraan jejaring pendidikan Nasional (JARDIKNAS)						Terlaksananya Penyelenggaraan Jardiknas Dinas Pendidikan	100%	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.01 22.14	Pengembangan Program Adiwiyata						Terlaksananya Kegiatan Adiwiyata Di Tingkat SD/SMP/SMA/SMK	100%	350.000.000,00	350.000.000,00	
1.01 22.23	Peningkatan manajemen pendidikan (pengelolaan aset keuangan dan kepegawaian dan kelembagaan)						Terlaksananya Bintek SDM Tenaga Pengelola Keuangan, Aset, Kepegawaian Dan Kelembagaan Sekolah	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	
1.01 22.26	Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah						Terlaksananya Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01 22.28	Penunjang Program Grindulu Mapan						Terlaksananya Program Grindulu Mapan Dan Manajemen Pengelolaan Kegiatan Grindulu Mapan	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01 22.30	Penunjang Operasional Bantuan Siswa Miskin (BSM)						Tersosialisasikannya Program Bantuan Siswa Miskin	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.02	KESEHATAN								137.116.033.003,00	137.116.033.003,00	
1.02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	I. Layanan Pendidikan	02. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan		Prosentase Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan (%)	95			6.897.770.000,00	6.597.770.000,00	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			daerah								
1.02 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)						Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	6.697.770.000,00	6.897.770.000,00	
1.02 15.07	Pengadaan Obat Penunjang Pelayanan Kesehatan						Jumlah pengadaan obat penunjang kesehatan	100%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.02 15.08	Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten						Operasional pelayanan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Gudang Farmasi Kabupaten	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2. Layanan Kesehatan	02. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Prosentase Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan (%)	95			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)						Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	6.897.770.000,00	6.897.770.000,00	
1.02 15.07	Pengadaan Obat Penunjang Pelayanan Kesehatan						Jumlah pengadaan obat penunjang kesehatan	100%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.02 15.08	Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten						Operasional pelayanan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Gudang Farmasi Kabupaten	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2. Layanan Kesehatan	02. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Kunjungan puskesmas/visit rate (%) Prosentase Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit (%)	(86,75), (10,60)			32.096.923.895,00	32.096.923.895,00	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02 16.07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan						Jumlah sasaran pemantauan pengelolaan obat dan alkes di Puskesmas Jumlah sasaran Pemantauan Pengelolaan obat di Apotek Jumlah sasaran Pemantauan Peredaran kosmetika di salon kecantikan Jumlah sasaran Pendampingan Pemeliharaan(kalibrasi)alkes puskesmas Pertemuan Perencanaan obat dan BMHP puskesmas Jumlah peserta bimtek Pertemuan pemakaian obat rasional (CBIA) Jumlah peserta bimtek Pertemuan pengelolaan ASPAK Jumlah peserta bimtek Pertemuan Petugas Pengelola Alkes puskesmas Jumlah peserta bimtek Pertemuan Pengelolaan manajemen logistik obat dan perbekalan kesehatan dinkes	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Program/ Outcome		Kegiatan/ Output				
					Uraian	Target	Uraian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02 16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan						Jumlah sasaran Penilaian Kinerja Puskesmas Jumlah sasaran standarisasi puskesmas Jumlah sasaran penilaian standar puskesmas Jumlah penilaian standar poskesdes Jumlah sasaran akreditasi Puskesmas Jumlah peserta workshop Kesehatan Kerja Jumlah peserta workshop Perawatan pasca px pasung Jumlah peserta workshop kesehatan olah raga Jumlah peserta pelatihan PPI di Puskesmas Jumlah peserta pelatihan Laboratorium di Puskesmas Jumlah peserta pelatihan Kesehatan Mata Jumlah peserta pelatihan Kesehatan Gigi Jumlah peserta review perawatan kesehatan masyarakat petugas Pustu Jumlah peserta validasi data pelaporan SP2TP Jumlah peserta pertemuan review program pelayanan kesehatan dasar Jumlah sasaran pemantauan penderita jiwa yang dipasung kambuh Pos P3K PPHBN dan pemantauan hari raya, natal dan tahun baru	100%	350.000.000,00	350.000.000,00	
1.02 16.16	Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas						Jumlah UPT mendapat dana Operasional puskesmas melalui retribusi pelayanan kesehatan	100%	6.777.034.770,00	6.777.034.770,00	